

**ANALISIS PROYEKSI KEBUTUHAN LUAS LAHAN  
PERMUKIMAN DAN ARAH PERKEMBANGAN  
PERMUKIMAN KAWASAN PERKOTAAN  
YOGYAKARTA**

**Hanna Amalia Putri<sup>\*)</sup>, Annisa Mu'awanah Sukmawati<sup>\*)</sup>**

<sup>\*)</sup>Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi,  
Universitas Teknologi Yogyakarta

**ABSTRAK**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.09 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2011-2030, menjelaskan bahwa sebagian Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Sewon termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang mempunyai fungsi sebagai kawasan permukiman bagi perkotaan Yogyakarta. Perkembangan permukiman yang tidak dilakukan perencanaan yang baik menyebabkan masalah kawasan permukiman kumuh pada wilayah pinggiran perkotaan.

Perencanaan dan pengendalian permukiman harus dilakukan. Penelitian bertujuan untuk memproyeksi luas lahan permukiman dan arah perkembangan permukiman Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) di Kabupaten Bantul Tahun 2039. Wilayah penelitian mencakup 3 kecamatan yang termasuk dalam KPY Kabupaten Bantul, yaitu Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis deskriptif kuantitatif dan pemetaan. Variabel yang digunakan meliputi variabel kependudukan, penggunaan lahan dan sarana prasaranan permukiman. Cakupan analisis yang dilakukan meliputi proyeksi penduduk, proyeksi unit rumah berimbang (1:2:3), proyeksi luasan kebutuhan lahan serta analisis arah perkembangan permukiman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyeksi luas lahan permukiman dalam kurun waktu 20 tahun mendatang hingga tahun 2039 akan meningkat. Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Sewon memiliki total kebutuhan luas lahan permukiman 2.505.670 m<sup>2</sup> atau 250,6 ha dan atau 2,8% dari total luas lahan wilayah penelitian. Adapun proyeksi jumlah rumah sebanyak 47.324 unit rumah di Kecamatan Banguntapan, 41.902 unit rumah Kecamatan Kasihan, dan 38.002 unit rumah di Kecamatan Sewon. Persentase terbesar dan terkecil desa memiliki luasan penggunaan lahan terbangun tahun proyeksi 18%-100%. Peningkatan kebutuhan luas permukiman sebesar 2%-4%. Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Kasihan memiliki persentase kebutuhan rata-rata 4% sedangkan Kecamatan Sewon memiliki rata-rata 3% dari total luas lahan.

Kata Kunci: Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Perkembangan Permukiman

**ACC 3 Juni 2021**



**Annisa Mu'awanah Sukmawati, S.T, M.**

**PROJECTION ANALYSIS OF LAND AREA REQUIREMENTS SETTLEMENTS AND  
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
YOGYAKARTA URBAN SETTLEMENTS**

**Hanna Amalia Putri<sup>\*)</sup>, Annisa Mu'awanah Sukmawati<sup>\*)</sup>**

*<sup>\*)</sup> Urban and Regional Planning Study Program, Faculty of Science and Technology,  
University of Technology Yogyakarta*

**ABSTRACT**

*Regional Regulation of Bantul Regency No.09 of 2011 concerning Spatial Planning for 2011-2030 explains that some of Banguntapan, Kasihan, and Sewon Subdistricts are included in the Yogyakarta Urban Area which has a function as a residential area for urban Yogyakarta. The development of settlements that are not carried out with good planning causes problems in slum areas in urban suburbs.*

*Settlement planning and control must be carried out. This study aims to project the area of residential land and the direction of development of the Yogyakarta Urban Area (KPY) settlements in Bantul Regency in 2039. The research area covers 3 sub-districts included in the KPY of Bantul Regency, namely Banguntapan, Kasihan, and Sewon Districts. This research uses quantitative descriptive method with quantitative descriptive analysis and mapping. The variables used include population variables, land use and residential infrastructure. The scope of the analysis includes population projections, balanced housing unit projections (1:2:3), projections of the area of land requirements and analysis of the direction of settlement development.*

*The results show that the projected area of residential land in the next 20 years to 2039 will increase. Banguntapan, Kasihan, and Sewon sub-districts have a total land area of 2,505,670 m<sup>2</sup> or 250.6 ha and or 2.8% of the total land area of the study area. The projected number of houses is 47,324 housing units in Banguntapan District, 41,902 housing units in Kasihan District, and 38,002 housing units in Sewon District. The largest and the smallest percentages of villages have an area of built-up land use in the projected year of 18%-100%. Increased need for residential area by 2%-4%. Banguntapan and Kasihan sub-districts have an average need percentage of 4% while Sewon sub-district has an average of 3% of the total land area.*

**Keywords:** *Yogyakarta Urban Area, Bantul Regency, Settlement Development*

## DAFTAR PUSTAKA

- Awali, M. N., Oktaviani, A., Tallo, A. J., & Deyanara, E. (2019). Struktur Dan Distribusi Kependudukan Kota Administratif Jakarta Utara Tahun 2012-2016. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 583. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1013>
- Badruzzaman. (2008). Perkembangan permukiman diperkotaan. *Jurnal "AI-Qalam" No.*, XIV(Xxi), 75–94.
- Baloch, Q. B. (2017). *Pengaruh Kebutuhan Lahan Untuk Perumahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Sawah Di Kabupaten Bantul*. 11(1), 92–105.
- BPS Kabupaten Bantul. (2020). Kabupaten Bantul dalam Angka 2020.
- BPS Kabupaten Bantul. (2020). Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2020.
- BPS Kabupaten Bantul. (2020). Kecamatan Kasihan Dalam Angka 2020.
- BPS Kabupaten Bantul. (2020). Kecamatan Sewon Dalam Angka 2020.
- BPS Kabupaten Bantul. (2015). Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2015.
- BPS Kabupaten Bantul. (2015). Kecamatan Kasihan Dalam Angka 2015.
- BPS Kabupaten Bantul. (2015). Kecamatan Sewon Dalam Angka 2015.
- BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Provinsi DIY dalam Angka 2020.
- Dalam, K., Daerah, L., Jogjakarta, I., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., Republik, N., & Negara, T. L. (2018). *Bupati bantul*. 1–41.
- Dtu, G., & Io, M. A. D. P. L. C. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.
- Damayanti, A. P., Hardiana, A., Rahayu, P., Teknik, F., Maret, U. S., Teknik, F., Maret, U. S., Teknik, F., Maret, U. S., Permukiman, P., & Pesisir, W. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Permukiman di Wilayah Pesisir Kabupaten Purworejo The Factors Influencing The Development of Settlements in The Coastal Area. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 14(2), 154–172.
- Febriyanti, A. D., & Ariastita, P. G. (2013). Optimasi Penggunaan Lahan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Mejayan Kabupaten Madiun. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(2), 123–128.
- Setyorini, B., Geografi, F., & Surakarta, U. M. (2015). *Proyeksi Kebutuhan Permukiman*.

- Fitria. (2013). Ketersediaan Lahan Yang Sesuai Untuk Pengembangan Permukiman Di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lestari, W., & Pratomoatmojo, A. (2019). Pemodelan Spasial Prediksi Perkembangan Kawasan Permukiman Berbasis Cellular Automata dengan Pendekatan Kependudukan di Surabaya Timur. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), 150–155.
- Ministry of Health, R. of I. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. *Phys. Rev. E*.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 2 tahun 2010*. 1–64. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25982>
- Peraturan Pemerintah RI. (1992). *Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman*.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 2 tahun 2010*. 1–64. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25982>
- Peraturan Pemerintah RI. (1992). *Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman*.
- Ministry of Health, R. of I. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. *Phys. Rev. E*.
- RI, H. (1987). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987*, 1. <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-Negara/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-2-tahun-1987-856>
- Rahmayana, L., & Handayani, W. (2016). Transformasi Sosial Ekonomi Penduduk Lokal Akibat Adanya Pembangunan Di Kawasan Solo Baru Kabupaten Sukoharjo. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 5(3), 174–185.
- Setyorini, B., Geografi, F., & Surakarta, U. M. (2015). *Proyeksi Kebutuhan Permukiman*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Warsono, A., Soetomo, S., & Wahyono, H. (2012). Perkembangan Pemukiman Pinggiran Kota pada Koridor Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 1(1), 19–23.
- Wijaya, M. S., & Umam, N. (2015). Pemodelan Spasial Perkembangan Fisik Perkotaan Yogyakarta Menggunakan model Cellular Automata dan Regresi